

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KOTA MANADO
(Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting)¹**

Oleh : Priska A. Matualage²

ABSTRAK

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM). Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program bantuan sosial, salah satunya program keluarga harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP. Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Implementasi Program Keluarga Harapan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara bertahap dan konsisten sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan PKH tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Manado khususnya di Kecamatan Tuminting. Dan juga untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Yang menjadi informan berjumlah 11 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting ini sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinya yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya masing terdapat kendala-kendala yang terjadi.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Implementasi Kebijakan

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan ini bukan hanya berada pada negara-negara berkembang dan terkebelakang, melainkan juga negara-negara maju yang ada. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Melihat cita-cita yang luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah.

Dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program-program bantuan sosial yang ada, maka saya penulis ingin membahas salah satu program kebijakan bantuan sosial, yaitu :Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dikeluarkan melalui kementrian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

PKH mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM di Indonesia kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM. Salah satunya Sulawesi Utara Termasuk salah satu Provinsi yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang dilaksanakan di provinsi Sulawesi Utara dikatakan sudah cukup baik. Tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kota Manado di Kecamatan Tuminting, program ini sudah dijalankan sesuai dengan proses dan mekanisme alur kerja PKH. Namun dalam pelaksanaannya didapati program ini tidak terlepas dari masalah/ hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam program keluarga harapan yang ada di Kota Manado khususnya di Kecamatan Tuminting. Serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada implementasi kebijakan.

KERANGKA TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan publik atau kebijakan umum. Merumuskan kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik, keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan (Ekowati :2004 : 1).

Sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan, seperti yang diungkapkan oleh pakar Inggris, W.I Jenkin (1978 : 15), (Wahab 2012 : 15), kebijakan publik adalah *“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Konsep Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster (Wahab2012 : 135) merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dalam pandangan ini implementasi diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Model Implementasi menurut George C. Edward III (Nugroho 2008 : 447), sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Konsep Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber dayam manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran KSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif (sugiyono 2008 : 15).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado di Kecamatan Tuminting. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena kecamatan ini sering mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses PKH.

Fokus Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang diangkat penelitian ini, maka fokus penelitian adalah "*Implementasi Kebijakan Program keluarga Harapan*" di Kota Manado khususnya di Kecamatan Tuminting sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial untuk memberikan bantuan kepada KSM untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum.

Informan

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive yaitu peneliti menemukan sendiri yang diambil karena pertimbangan tertentu, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik snowball, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan. Informan yang diambil dari pihak pemerintah (Dinas sosial Provinsi atau Kab/Kota, UPPKH provinsi atau Kab/Kota, Pengurus Kecamatan Tuminting, dan pendamping kecamatan) dan pihak masyarakat (peserta yang menjadi penerima PKH dan bukan penerima), dengan jumlah 11 informan.

Instrument dan Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dari beberapa cara (sugiyono 2008:63) ; Observasi, wawancara, dan studi dokumen

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data. Karena penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik analisa data yang relevan adalah teknik analisa data yang deskriptif. Istilah dalam penelitian kualitatif sebagai merangkum data memilih hal-hal yang penting (sugiyono 2008:247).

Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap. Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara
2. Reduksi data
3. Uji confirmability
4. Penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program dan Mekanisme PKH

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan KSM (Keluarga sangat Miskin). Sebagai imbalannya KSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan

Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Program Keluarga Harapan mempunyai dua prioritas bantuan dana, yaitu untuk bidang kesehatan dan pendidikan, masing-masing bidang ini telah dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan alur mekanisme yang telah ditetapkan, seperti bentuk kerja sama kepengurusan PKH dengan layanan kesehatan maupun pendidikan, bekerja sama dengan seluruh puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan melalui akses pemerintah, serta bekerja sama dengan sekolah-sekolah, yang tentunya telah disepakati dari tingkat pusat.

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh UPPKH Pusat.

Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran, verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan.

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tuminting

Program Keluarga Harapan yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat yang termasuk kategori KSM untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan maupun pendidikan, dan diharapkan peserta PKH mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan mekanisme yang dimulai dari pendataan KSM oleh BPS dan Non BPS lalu ditetapkan oleh UPPKH pusat, kemudian dilakukan sosialisasi, sampai pada pencairan atau pembayaran kepada peserta PKH melalui PT Kantor Pos.

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh George Edward III akan bisa menjelaskan proses implementasi PKH, diantaranya :

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi berkenaan untuk dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan / atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat,

dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Meninjau pengertian komunikasi menurut George Edward III yang sudah dijelaskan diatas, Maka proses implementasi PKH di Kecamatan Tuminting ini dapat penulis simpulkan kurang baik, karena seperti wawancara dengan pendamping kecamatan, Ia mengatakan ;

''Banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan PKH di Kecamatan Tuminting tidak tau-menau dengan program ini, sosialisasi tentang program ini termasuk minim, sehingga banyak masyarakat miskin yang layak menerima bantuan ini tidak tercatat sebagai peserta karena tidak tersurvey dan tidak tahu informasi adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah''. (wawancara dengan pendamping Kecamatan tuminting, Ibu Jeane Marila).

Resources (sumber daya)

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Pada proses implementasi PKH di Kecamatan Tuminting ini sumber daya juga menjadi salah satu faktor penghambat yang penulis temukan dilapangan, menurut hasil wawancara dengan peserta PKH, Ia mengatakan ;

''Pendamping dikecamatan kami sudah baik dalam melaksanakan tugas, namunseringkali kamibingung kalau ada pertemuan mendadak dan persyaratan yang diminta guna pendataan untuk PKH, kami juga ingin pendamping kami untuk meninjau langsung keadaan kami agar mengetahui juga kenapa kami sering mendapatkan halangan untuk memenuhi permintaan dari pendamping''. (wawancara dengan ibu salah satu penerima PKH di Kecamatan Tuminting, Ibu EM).

Menurut George Edward III, Ia mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Disposition

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting

yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Seperti halnya proses implementasi di Kecamatan Tuminting ini masih dibilang kurang baik.

Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pendamping kecamatan, Ia mengatakan ;

''Walaupun saya merupakan pendamping pengganti, namun ketika saya diangkat sebagai pendamping untuk peserta PKH saya juga harus memperhatikan tingkah laku dan sikap saya. Karena banyak KSM yang sering kali harus diperlakukan tegas agar mau melakukan kewajiban mereka sebagai peserta PKH, (wawancara dengan salah satu pendamping Kecamatan Tuminting, Ibu Jeane Marila).

Dapat disimpulkan proses implementasi juga tidak akan berjalan sesuai dengan proses ketika disposisi dari pelaksana kebijakan tidak dijalankan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Seperti yang dikemukakan George Edward III bahwa struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam proses implementasi, maka penulis pun melihat struktur birokrasi dalam proses implementasi PKH di Kecamatan Tuminting ini kurang baik, seperti yang penulis tinjau dilapangan dan mewawancarai aparatur pemerintah, penulis pun mendapatkan kejanggalan tentang koordinasi struktur birokrasi PKH.

''Memang betul struktur birokrasi PKH ini telah menetapkan pengurus UPPKH-Pusat ke UPPKH-kab/kota ke UPPKH-kec, namun karena kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat ke daerah tentang struktur birokrasi ini banyak pemerintah daerah, kab/kota, atau pun kecamatan tidak mengerti dengan tugas dan tanggung jawab mereka, Ia menjelaskan juga bahwa kepala dinas sosial kota manado hanya sebagai pengawas program pemerintah''. (wawancara dengan Bapak Sudadi staf bidang bantuan sosial di dinas sosial Kota Manado).

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dengan melihat hasil penelitian dan wawancara diatas pemerintah harus lebih jelas dalam pembentukan struktur

birokrasi yang ada agar garis koordinasinya juga jelas, supaya proses Implementasi PKH juga berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tuminting mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi KSM namun belum terjangkau sepenuhnya. tidak konsistennya Peserta PKH terhadap ketentuan atau syarat yang telah di tentukan, Penyaluran Program Keluarga Harapan dinilai tidak konsisten dengan, pemyaluran pada tahap awal, dan kurangnya informasi atau pun sosialisasi bagi peserta PKH.
2. Berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi program PKH di Kecamatan Tuminting baik dari faktor interen dan faktor eksteren. Salah satu faktor terpenting dari program PKH ini adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
3. Kurangnya koordinasi dari pemerintah pusat dan daerah mengenai struktur birokrasi, peran pemerintah dalam hal ini pihak Pemerintah Kota(Kepala Dinas Sosial), Kecamatan (camat),serta di kelurahan (lurah), belum maksimal, hanya sebagai pengawas formal saja terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, berdasarkan hasil penelitianantara lain:

1. Pemerintah seharusnya melakukan pendataan kembali, agar rumah tangga yang masuk kategori KSM yang layak bisa menerima bantuan ini. Komunikasi dan sosialisasi harus di tingkatkan oleh pemerintah, agar masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH bisa terjangkau. Selain itu penyaluran yang dinilai tidak konsisten Pengurus atau Pendamping seharusnya memberikan penjelasan yang pasti tentang ketidakjelasan jumlah nominal yang diterima peserta dengan langsung mengkomunikasikan dan melaporkan kegagalan bantuan yang diterima peserta PKH.
2. Mensinergikan keterpaduan antar program-program penanggulangan kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi program pencitraan semata. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel dalam kepengurusan apabila ada kesalahan teknis dalam proses kegiatan PKH. Melibatkan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Program

Keluarga Harapan yang meliputi pemilihan KSM penerima, pendampingan, pengawasan serta evaluasi.

3. Dalam pelaksanaan PKH Kementrian Sosial, Pemerintah Kab/Kota, maupun Kecamatan lebih meningkatkan fungsi pengawasan langsung jalannya program Keluarga Harapan ini dengan terus berkoordinasi dengan pendamping Kecamatan, agar dapat dilihat bukti nyata kesiapan Daerah atau Kecamatan Tumiting dalam menjalankan Kebijakan Bantuan PKH ini. Para pendamping kirannya dapat menjadi pengarah yang baik bagi peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

Ekowati, Lilik Roro Mas. 2004. Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program

Islamy, Arfan. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara Jakarta.

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, PT. Elex Media Komputindo

Purwanto, E. Agus dan Sulistyastuti, R. Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media Yogyakarta.

Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan actor dalam proses kebijakan public*, Gava media Yogyakarta

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabet, 2008.

Wahab, Solichin A. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Sumber Lain :

- ✓ UU no. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial.
- ✓ UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- ✓ Inpres no. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.
- ✓ Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- ✓ UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
- ✓ Buku Penyusunan modul Diklat pendamping Program Keluarga Harapan pusat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Badan peendidikan dan penelitian Kesejahteraan sosial Kementrian Sosial RI.
- ✓ www.kemensos.co.id
- ✓ <http://www.tnp2k.go.id//program-keluarga-harapan>

Filename: @BCL@F017FA25
Directory: C:\Windows\system32
Template: C:\Users\Toshiba\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot
m
Title:
Subject:
Author: pikha
Keywords:
Comments:
Creation Date: 4/23/2015 2:18:00 PM
Change Number: 6
Last Saved On: 5/5/2015 1:16:00 AM
Last Saved By: Toshiba
Total Editing Time: 85 Minutes
Last Printed On: 5/5/2015 1:17:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 10
Number of Words: 3,152 (approx.)
Number of Characters: 21,910 (approx.)